

PERMASALAHAN SOSIAL RUANG PUBLIK ALUN-ALUN KAJEN

Prada Potte Shaleha¹⁾, Hikmatus Saputri²⁾

^{1,2}Universitas Diponegoro

e-mail corresponding: pradapottree@gmail.com

Submitted: 08/01/2024 Reviewed: 05/02/2024 Revised: 01/03/2024 Accepted: 15/03/2024 Published: 31/07/2024

ABSTRAK

Ruang publik merupakan ruang terbuka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan berfungsi sebagai wadah interaksi sosial, rekreasi, serta aktivitas ekonomi informal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap fasilitas ruang publik, khususnya kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan sosial dalam pemanfaatan ruang publik di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, pascarehabilitasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan sebagai data primer serta *desk review* dokumen kebijakan dan literatur sebagai data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alun-Alun Kajen telah memiliki beberapa fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, namun belum terintegrasi secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas fisik berupa jalur pedestrian tanpa ramp, jalur pemandu yang tidak berfungsi optimal, serta adanya kecenderungan privatisasi ruang melalui penyewaan lapangan olahraga yang berpotensi membatasi akses publik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ruang publik di wilayah kabupaten atau non-metropolitan dengan menekankan pentingnya dimensi keadilan sosial dalam perencanaan ruang. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi ruang publik tidak cukup diukur dari peningkatan estetika dan aktivitas, tetapi harus disertai dengan pemenuhan prinsip aksesibilitas, inklusivitas, dan pengelolaan ruang yang berorientasi pada kepentingan seluruh warga.

Kata Kunci: *Aksesibilitas Fisik, Kesenjangan Sosial, Ruang Publik*

ABSTRACT

Public space is an open area that can be accessed by all members of society and functions as a medium for social interaction, recreation, and informal economic activities. However, in practice, equal access to public space facilities is not always experienced by all social groups, particularly persons with disabilities. This study aims to identify forms of social problems in the utilization of public space at Kajen Town Square, Pekalongan Regency, after its rehabilitation. The study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through field observation as primary data and desk review of policy documents and relevant literature as secondary data, which were then analyzed using thematic descriptive analysis. The findings indicate that Kajen Town Square has provided several

disability-supporting facilities, yet they are not optimally integrated. The main problems include limited physical accessibility such as pedestrian paths without ramps, malfunctioning guiding paths, and the tendency toward space privatization through the rental of sports fields, which potentially restricts public access. This study contributes to the literature on public space management in non-metropolitan areas by emphasizing the importance of social justice in spatial planning. Overall, the study concludes that the success of public space revitalization should not be measured solely by physical improvement and increased activity, but also by the extent to which accessibility, inclusivity, and equitable spatial governance are ensured for all citizens.

Keywords: *Physical Accessibility, Social Disparity, Public Space*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang pesat dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan telah memberikan tekanan signifikan terhadap ketersediaan dan kualitas ruang terbuka publik. Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan ruang publik sebagai indikator penting dalam pencapaian kota berkelanjutan karena berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, aktivitas ekonomi informal, rekreasi, ekspresi budaya, serta peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat (Martinez-Bäckström dkk., 2016). Di Indonesia, tingkat urbanisasi telah mencapai lebih dari 56% pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi 66% pada tahun 2035 (BPS, 2023). Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan ruang publik yang layak, aman, dan inklusif, khususnya di kota-kota yang tengah berkembang. Ruang terbuka publik seperti taman kota dan alun-alun memiliki karakter sebagai ruang gratis, dapat diakses lintas kelompok sosial, serta memungkinkan terjadinya aktivitas komunal yang memperkuat kohesi sosial (Ahmadin dkk., 2023). Dalam konteks perencanaan kota di Indonesia, alun-alun secara historis dan fungsional diposisikan sebagai pusat kegiatan sosial dan seremonial, yang secara fisik umumnya berbentuk persegi dan dimanfaatkan untuk kegiatan upacara, perayaan, dan aktivitas massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009.

Kabupaten Pekalongan memiliki pusat pemerintahan dan aktivitas perkotaan yang terletak di Kecamatan Kajen, dengan Alun-Alun Kajen sebagai ruang publik utama. Alun-alun ini telah mengalami rehabilitasi sejak tahun 2022 dan diresmikan kembali pada Januari 2024 dengan fasilitas yang lebih modern, tata ruang yang lebih tertata, serta peningkatan daya tarik visual. Pascarevitalisasi, Alun-Alun Kajen tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi keluarga, tetapi juga sebagai lokasi aktivitas olahraga, pusat kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima, serta arena berbagai acara budaya dan kegiatan massal. Tingginya intensitas kunjungan masyarakat menunjukkan bahwa alun-alun telah menjadi simpul sosial baru di Kabupaten Pekalongan. Namun, di balik peningkatan fungsi dan

estetika tersebut, muncul berbagai persoalan sosial, seperti potensi konflik pemanfaatan ruang antara pengunjung dan pedagang, persoalan kebersihan, ketertiban, keamanan, vandalisme, serta indikasi eksklusi sosial terhadap kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi ruang publik tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, tetapi juga sangat bergantung pada tata kelola ruang, regulasi, serta pola interaksi sosial yang berkembang di dalamnya (Siregar, 2021).

Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Low, dkk (2009) menunjukkan bahwa revitalisasi ruang publik dapat meningkatkan kualitas fisik lingkungan, tetapi berpotensi memicu komersialisasi dan eksklusi sosial. Putra, dkk (2015) menemukan bahwa alun-alun Kota Bandung mengalami pergeseran fungsi dari ruang sosial menjadi ruang ekonomi informal yang padat, sehingga menurunkan tingkat kenyamanan pengunjung. Aminah (2015) menegaskan bahwa penataan ruang kota sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kapital dan logika pasar, yang dapat mengurangi fungsi sosial ruang publik. Penelitian yang lebih mutakhir oleh Murti (2024) menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepadatan pengunjung di ruang terbuka publik berkorelasi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial, termasuk konflik kepentingan dan degradasi kualitas lingkungan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kota metropolitan atau ibu kota provinsi, sementara kajian yang secara spesifik membahas dinamika sosial pascarevitalisasi alun-alun di wilayah kabupaten atau kota non-metropolitan masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian terkait pemahaman kontekstual mengenai permasalahan sosial ruang publik di kota-kota kecil yang sedang berkembang, termasuk di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk permasalahan sosial yang muncul dalam pemanfaatan ruang publik di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, pascarehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman pengguna ruang, pola interaksi sosial, serta mekanisme tata kelola ruang publik. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) permasalahan sosial apa saja yang muncul dalam pemanfaatan Alun-Alun Kajen sebagai ruang publik, dan (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi perkotaan dan studi ruang publik dengan menghadirkan perspektif kota kabupaten yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. Secara praktis, hasil penelitian

ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan ruang publik yang lebih inklusif, aman, tertib, dan berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika pemanfaatan ruang publik serta permasalahan sosial yang muncul di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, pascarehabilitasi. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat kontekstual dan berkaitan dengan perilaku, interaksi, serta pengalaman sosial pengguna ruang, sehingga membutuhkan pemahaman yang holistik terhadap situasi lapangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah ruang publik Alun-Alun Kajen sebagai objek material, yang mencakup kondisi fisik ruang, fasilitas yang tersedia, pola pemanfaatan ruang, serta aktivitas sosial dan ekonomi yang berlangsung. Selain itu, unit analisis juga mencakup aktor sosial yang terlibat dalam pemanfaatan ruang, seperti pengunjung, pedagang kaki lima, dan pihak pengelola atau instansi terkait, sebagai objek formal untuk memahami relasi sosial dan tata kelola ruang publik.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan fokus pada satu lokasi spesifik, yaitu Alun-Alun Kajen, yang dipilih karena mengalami perubahan signifikan setelah program rehabilitasi dan menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat Kabupaten Pekalongan. Desain ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik ruang publik dan permasalahan sosial yang berkembang dalam konteks lokal yang spesifik. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung terhadap kondisi fisik, tingkat keterisian ruang, jenis aktivitas pengunjung, interaksi sosial, serta keberadaan aktivitas ekonomi informal di kawasan alun-alun. Data sekunder diperoleh dari dokumen institusional, regulasi pemerintah terkait ruang terbuka publik, laporan pemerintah daerah, serta artikel ilmiah dan buku yang membahas ruang publik, tata kelola perkotaan, dan inklusivitas ruang bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan desk review. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian pada berbagai waktu kunjungan untuk menangkap variasi aktivitas dan pola pemanfaatan ruang, serta mengidentifikasi potensi konflik, masalah kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Desk review dilakukan dengan menelaah literatur ilmiah, kebijakan, dan dokumen perencanaan yang relevan untuk memahami kerangka konseptual ruang publik dan standar pengelolaannya. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu

reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang mengelompokkan jenis-jenis permasalahan sosial dan faktor penyebabnya, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola-pola yang muncul dari hasil observasi dan kajian dokumen. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan hasil untuk menjaga konsistensi temuan dan memperkuat kedalaman interpretasi terhadap dinamika sosial ruang publik yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik Alun-Alun Kajen

Alun-alun Kajen merupakan ruang publik yang berada di Kecamatan Kajen sebagai pusat perkotaan Kabupaten Pekalongan yang terletak di Jalan Mandurorejo Kajen. Setelah adanya pemindahan ibu kota Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen pada Agustus 2001, Alun-alun kajen berkembang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan sosial. Letak alun-alun ini sangat strategis yaitu berada di tengah pusat kota menjadikan alun-alun Kajen sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat. Alun-Alun Kajen memiliki daya tarik yaitu bagian pendopo yang menggunakan gaya arsitektur rumah joglo khas Jawa Tengah, pendopo ini sering kali digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Tidak hanya itu, terdapat *icon* dari Alun-Alun Kajen yaitu monumen Al-Quran yang berlokasi ditengah air mancur dan monumen ini dapat berputar serta terdapat suara murotal Al-Quran. Gambaran Alun-alun Kajen dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Citra Google Earth, 2023

Gambar 1 Alun-Alun Kajen

Pada tahun 2022, kawasan Alun-alun Kajen dengan luas 4,7 hektar dilakukan penataan ulang. Penataan tersebut dilakukan dalam dua tahap pembangunan yaitu pada

tahun 2022 dan 2023 dan diresmikan pada awal tahun 2024. Pembangunan tersebut menjadikan Alun-alun Kajen semakin memiliki daya tarik dan daya guna yang lebih. Saat ini, alun-alun kajen menjadi pusat rekreasi masyarakat setempat dan juga menjadi tempat diselenggarakannya acara-acara besar. Sebagai tempat yang memiliki kedudukan sentral, alun-alun kajen menjadi simbol keberagaman dan kebersamaan masyarakat serta menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun fasilitas publik yang ada di Alun-alun Kajen ini berupa 1) Jalur Pedestrian, 2) Jalur Pemandu, 3) Area Parkir, 4) Ramp, 5) Kursi Taman, 7) Lapangan olahraga, dll.

Berdasarkan kondisi fisik alam, Alun-Alun Kajen berada pada daerah hujan tropis (AF) dengan curah hujan sedang dari Bulan Juni hingga Bulan September dan terjadi curah hujan tinggi dari Bulan Oktober hingga Bulan Mei. Tidak hanya itu, Alun-Alun Kajen juga tidak memiliki tiket masuk atau pihak pengelola tidak memungut biaya apapun serta memiliki jam operasional yaitu mulai dari pukul 04.00 – 23.59 WIB. Tentunya, jam ini berlaku saat *weekend* maupun *weekday*.

Isu Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2017, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam dirinya seperti keterbatasan fisik, mental dan sensorik sehingga menjadi penghambat dalam ruang gerak serta mengalami kesulitan dalam hidup untuk berinteraksi sosial dilingkungannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, pemerintah tentu wajib memberikan dan menyediakan fasilitas publik yang mudah dijangkau dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum rentan seperti disabilitas dan juga lansia. Berikut merupakan data disabilitas di Kecamatan Kajen yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Disabilitas Kecamatan Kajen Secara Urutan Waktu Januari-Oktober 2023

No.	Data Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	160
2.	Tuna Netra	51
3.	Tuna Rungu	41
4.	Tuna Wicara	37
5.	Tuna Rungu dan Wicara	7
6.	Tuna Netra dan Daksa	8
7.	Tuna Netra, Rungu, dan Wicara	5
8.	Tuna Rungu, Wicara, dan Daksa	6
9.	Tuna Rungu, Netra, Wicara, dan Daksa	7

No.	Data Disabilitas	Jumlah
10.	Tuna Mental Reterdasi	115
11.	Bekas Penderita Gangguan Jiwa	38
12.	Tuna Daksa dan Mental	53
TOTAL		528

Sumber : Sidesa Jawa Tengah. 2024

Berdasarkan data disabilitas Kecamatan Kajen pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang lebih dominan adalah tuna daksa yaitu sebanyak 160 jiwa. Menurut Suroyo, pengertian kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa) adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Tuna mental reterdasi menjadi urutan kedua penyandang disabilitas terbanyak di Kecamatan Kajen yaitu sebanyak 115 jiwa. Berdasarkan data tersebut, sudah harus menjadi perhatian bersama bahwa penyandang disabilitas juga harus merasakan fasilitas yang sama dengan masyarakat lainnya. Salah satunya dalam mengakses ruang publik berupa alun-alun. Sebagai salah satu ruang public yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, tentu menjadikan Alun-alun Kajen sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pendukung bagi disabilitas juga perlu diperhatikan.

Kecamatan Kajen memiliki alun-alun yang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat mengunjungi ruang publik tersebut. Memenuhi persyarikat aksesibilitas bagi semua pengguna jalan termasuk bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki. Akan tetapi pada realitanya tidak demikian, salah satunya seperti Alun-Alun Kajen dimana fasilitas jalur pedestrian belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena belum adanya *ramp* dari area parkir menuju taman alun-alun dan juga terdapat kerusakan pada jalur *pedestrian* sehingga menyulitkan akses bagi para penyandang disabilitas untuk masuk dan berkeliling di dalam maupun di luar alun-alun. Adapun ram yang tersedia hanya berada di dalam area taman aja, itupun tidak mengarah ke area parkir tetapi justru ke lahan hijau yang berada di samping lahan yang telah terbangun.

Kesenjangan privatisasi sarana ruang publik terjadi pada Alun-Alun Kajen, hal ini dibuktikan berdasarkan adanya pemasangan baliho terkait penyewaan lapangan olahraga yang berada di sebelah barat. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan sifat ruang publik yang seharusnya dapat digunakan oleh siapapun tanpa melibatkan perizinan kepada pemerintah ataupun perseorangan. Maka dari itu, perlu adanya kepastian terkait perizinan apakah terdapat sewa atau tidaknya pada lapangan olahraga ini, Sebagaimana, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024

Gambar 2 Lapangan Olahraga

Analisis Kesenjangan Ruang Publik bagi Disabilitas

Analisis kesenjangan ruang publik bagi disabilitas dilakukan dengan mengkoparasikan kondisi eksisting fasilitas ruang publik yang berada di Alun-alun Kajen dengan standar teknis dari Permen PUPR No 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

a. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian merupakan ruas khusus bagi pejalan kaki yang terintegrasi atau terpisah dengan jalan. Jalur pedestrian diperuntukan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. Jalur pedestrian merupakan suatu elemen yang penting dalam perancangan kota karena



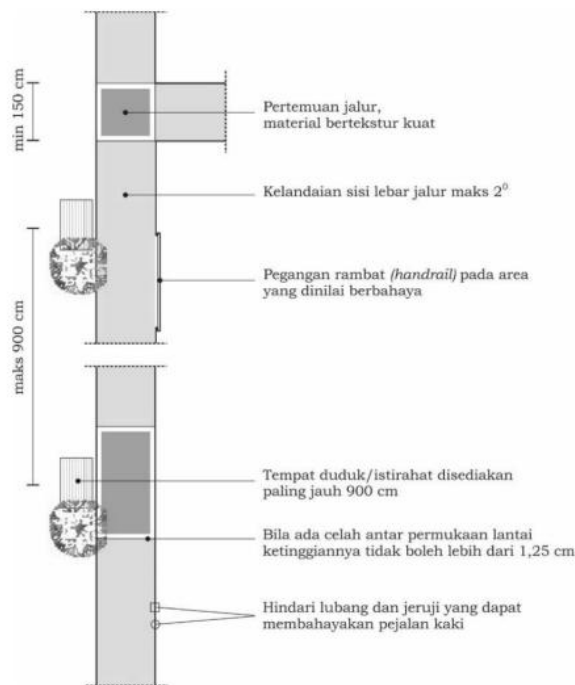
membentuk keterhubungan antar aktivitas pada suatu wilayah (Shirvani, 1985). Ketersediaan infrastruktur jalur pedestrian yang layak juga merupakan salah satu hak bagi pejalan kaki. Berikut merupakan kondisi jalur pedestrian di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024.

Gambar 3 Jalur Pedestrian Alun-Alun Kajen

Jalur pedestrian yang ada di Alun-alun Kajen belum memiliki *handrail* untuk pegangan orang dengan penyandang disabilitas. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Jalur Pedestrian harus sesuai dengan Gambar 4.



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 4 Standar Jalur Pedestrian dan Bangku

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, Jalur pedestrian harus memiliki *handrail* yang diletakan di sepanjang jalur atau area yang dianggap berbahaya bagi para penyandang disabilitas. Permukaan jalan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil serta tahan terhadap perubahan cuaca sehingga tidak licin. Permukaan jalan juga harus memiliki kelandaian sisi lebar jalur maksimal 2 derajat dan harus menghindari lubang dan jeruji yang dapat membahayakan pejalan kaki. Selain itu, harus terdapat tempat duduk yang disediakan paling jauh 900 cm.

b. Jalur Pemandu

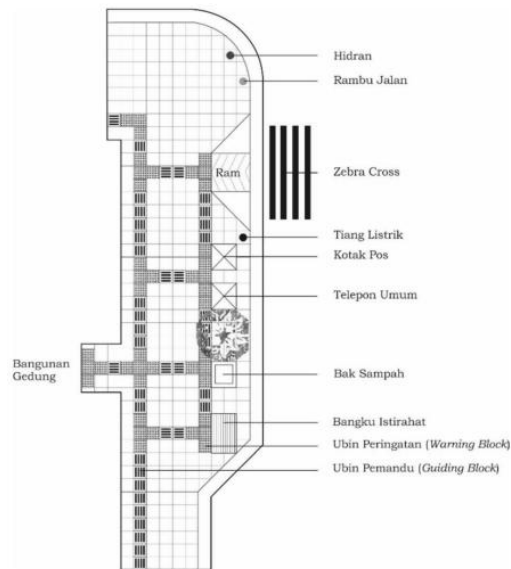
Jalur pemandu ialah jalur pemberi petunjuk perjalanan untuk penyandang disabilitas melalui penggunaan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Jalur pemandu merupakan jalur kuning bertekstur yang biasa berada di trotoar. Tekstur yang berbeda pada ubin menjadi petunjuk arah dan peringatan bagi penyandang tunanetra, sehingga mereka dapat mengidentifikasi rute perjalanan dengan mudah (Prahastuti et al., 2024) . Jalur pemandu terdapat dua jenis yaitu ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*). Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*). Berikut merupakan kondisi jalur pemandu yang berada di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024

Gambar 5 Jalur Pemandu Alun-Alun Kajen

Jalur pemandu yang berada di Alun-alun Kajen sudah tersedia di sepanjang jalan mengelilingi area alun-alun. Akan tetapi terdapat beberapa titik yang memperlihatkan bahwa jalur pemandu tersebut sudah kurang layak dan perlu adanya perbaikan. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Jalur pemandu harus sesuai dengan gambar dibawah ini:



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 6 Pinsip Perencanaan Jalur Pemandu

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, jalur pemandu harus dari bahan yang kuat dan tidak licin. Jalur pedestrian harus memberikan kode atau tanda untuk berhenti atau berbelok, membedakan warna jalur pemandu dengan material lainnya dan tidak boleh ada barang atau benda apapun yang menghalangi jalur pemandu (pohon, kurisi, dll).

c. Ramp

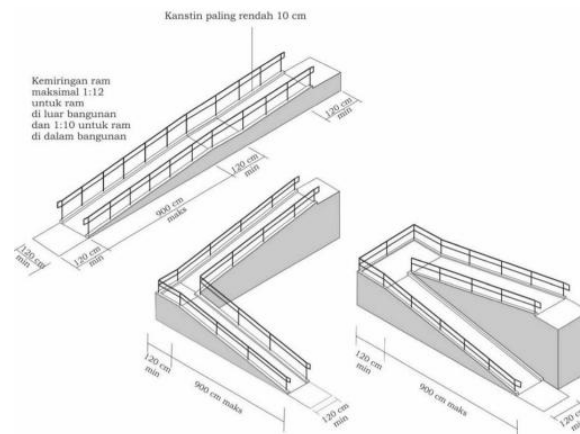
Ramp adalah bidang miring yang dibuat untuk menghubungkan perbedaan ketinggian lantai atau bangunan. Tunanetra adalah difabel yang paling sering mengalami kesulitan berkegiatan pada taman dan tidak diakomodasi aksesibilitasnya, termasuk juga tunadaksa pengguna kursi roda yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses ramp yang kemiringannya tidak manusiawi (Masruroh, Mauliani, & Anisa, 2015). Ramp pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan. Berikut merupakan kondisi ramp yang berada di Alun-alun Kajen yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Observasi Lapangan Peneliti, 2024

Gambar 7 Ramp Alun-alun Kajen

Ramp yang terdapat di Alun-alun Kajen hanya berada di dalam alun-alun saja dan tidak terdapat di bagian depan yang menghubungkan antara area parkir dan juga taman alun-alun. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menagakses taman. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menagakses taman. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Ramp harus sesuai dengan



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 8 Penerapan Standar dan Kemiringan Ramp

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017, ramp yang baik bagi disabilitas harus memiliki pegangan rambat (*handrail*), permukaan miring atau bidang miring ramp tidak boleh lebih dari 9 meter, lebar minimum ramp adalah 95 cm, bordes (muka datar) pada ramp harus bebas dan minimal memiliki ukuran 160 cm, permukaan datar pada awalan dan akhiran harus memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama pada saat hujan dan di berikan penerangan secukupnya agar bisa terang pada saat malam hari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pascarehabilitasi, Alun-Alun Kajen mengalami peningkatan kualitas fisik, daya tarik visual, dan intensitas pemanfaatan sebagai ruang rekreasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan terpenuhinya prinsip ruang publik yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Berbagai permasalahan sosial masih ditemukan, antara lain keterbatasan aksesibilitas fisik seperti jalur pedestrian yang tidak ramah disabilitas, jalur pemandu yang rusak atau terhalang, ketiadaan ramp yang menghubungkan area parkir dengan taman, serta potensi privatisasi ruang publik melalui penyewaan fasilitas olahraga. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh desain fisik dan estetika, tetapi juga oleh tata kelola ruang, kejelasan regulasi, serta sensitivitas perencana terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengayaan kajian sosiologi perkotaan dan perencanaan ruang publik dalam konteks kota kabupaten atau wilayah non-metropolitan yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa revitalisasi ruang publik di kota kecil pun dapat memunculkan persoalan sosial yang kompleks, terutama terkait eksklusi kelompok disabilitas dan kecenderungan komersialisasi ruang bersama. Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain ruang lingkup kajian yang hanya mencakup satu lokasi studi kasus, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan dan persepsi pengguna, serta keterbatasan durasi observasi yang belum sepenuhnya menangkap dinamika musiman dan perubahan pola pemanfaatan ruang dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pengelolaan Alun-Alun Kajen dengan mengacu secara konsisten pada standar aksesibilitas Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, termasuk penyediaan ramp yang terhubung langsung dengan area parkir, perbaikan jalur pedestrian dan jalur pemandu, serta penataan ulang praktik pemanfaatan ruang yang berpotensi memprivatisasi ruang publik. Selain itu, diperlukan mekanisme pengelolaan partisipatif yang melibatkan komunitas pengguna, kelompok disabilitas, dan pedagang kaki lima untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan meningkatkan rasa memiliki terhadap ruang publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi ruang publik tidak cukup diukur dari aspek estetika dan fungsi ekonomi semata,

tetapi harus dinilai dari sejauh mana ruang tersebut mampu menjamin akses yang setara, aman, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, D. S., & Navastara, A. M. (2024). Analisis Kualitas Jalur Pedestrian Jalan Kembang Jepun Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 13(2).
- Hanun, I. F., Purnamasari, W. D., & Sasongko, W. (2022). Evaluasi Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Alun-Alun Batu Berdasarkan Konsep Ramah Difabel. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 11(3), 19-28.
- Ima, D. N. (2024). *Arahan Penataan Alun-Alun Ponorogo Untuk Menciptakan Ruang Publik Yang Inklusif* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Masruroh, F., & Mauliani, L. (2015). Kajian Arsitektural Taman Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodia. 14(2).
- Meilani, F., & Arlysia, V. (2024). Analisis Jasa Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10748–10762. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11789>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2009). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/Prt/M/2009 Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. In *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. In *Jdih Kementerian Pupr*.
- Prahastuti, A. C., Setyowati, S., Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, & Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2024). 33 (Pp. 932–933).
- Putri, B. F., Putri, Azijah, D. N., Azijah, & Gumilar, G. G., Gumilar. (2024). Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. In *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Shirvani, H. (1985). *The urban design process*. Van Nostrand Reinhold.

SYACHPUTRA, M. V., & BUDIYANTINI, Y. (2024). Inklusivitas Ruang Terbuka Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik Di Kawasan Alun-Alun Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*, 657-661.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. In Undang-Undang Republik Indonesia.

Wibowo, D. S., & Aji, F. M. P. (2023, July). Arsitektur Inklusif sebagai Respon Kurangnya Aksesibilitas Pengguna Disabilitas pada Pengembangan Alun-Alun Wanareja. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 566-575).

Ahmadin, Kurniawan, A., Putri Hayam Dey, N., Nur Awal, M., Djumaty, B. L., Novan Prasetya, M., Puspitasari, M., Y Lopulalan, D. L., Fitriyah, N., Narendra Parahita, B., Omedetho Jermias, E., Rahman, A., & Suhaeb, F. W. (2023). *SOSIOLOGI RUANG PUBLIK PERKOTAAN*.

Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 5. <https://doi.org/10.7454/MJS.v20i1.1092>

Low, S. M., Taplin, D., & scheld, S. (2009). *Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity - Setha M. Low, Dana Taplin, Suzanne Scheld - Google Buku*. University of Texas Press. https://books.google.co.id/books/about/Rethinking_Urban_Parks.html?id=cUhYBCSA YIEC&redir_esc=y

Martinez-Bäckström, N., Andersson, C., Garau, P., Camargo, W. F., Camarinhas, C., Chabbi-Chemrouk, N., Chong, J., Dobson, R., Fortes, T., Gillet, C., Hoeflich De Duque, S., Kent, E., Miao, P., Mwongo, N., Odbert, C., Permezel, M., Petrella, L., Sepe, M., Silva, R., ... Zamorano, L. (2016). *Global Public Space Toolkit From Global Principles to Local Policies and Practice Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice*. www.unhabitat.orgHSNumber:HS/034/15E

Murti, M. A. B. (2024). Kegiatan Di Ruang Publik Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus: Alun-Alun Kota Bogor Activities In Public Space And Utilization Of Open Green Space, Case Study: Bogor City Square. *Jurnal Hirarchi*, 21(1), 14–20. https://www.researchgate.net/publication/377666474_Kegiatan_Di_Ruang_Publik_Dan_Pemanfaatan_Ruang_Terbuka_Hijau_Studi_Kasus_Alun-Alun_Kota_Bogor_Activities_In_Public_Space_And_Utilization_Of_Open_Green_Space_Case_Study_Bogor_City_Square

- Siregar, J. P. (2021). Korelasi Antara Konfigurasi Ruang Publik Dengan Interaksi Sosial. *Tata Kota dan Daerah*, 13(1), 15–22. <https://doi.org/10.21776/UB.TAKODA.2021.013.01.3>
- Putra, A. D., Azwir, M., Octaviany, V., & Nilamsuci, R. (2015). Kajian Transformasi Bentuk dan Fungsi Alun-alun Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Reka Karsa: Jurnal Arsitektur*, 3(3). <https://doi.org/10.26760/REKAKARSA.V3I3.696>
- TIM BPS. (2023, Februari). *Statistik Indonesia 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>